

KOMUNIKASI KEBIJAKAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN DAN PENYEDIAAN LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA JL. TJUK NYAK DIEN DI PEKANBARU

Renaldi Fikrian¹, Tantri Puspita Yazid², Anuar Rasyid³

^{1,2,3}Universitas Riau

renaldi.fikrian8955@grad.unri.ac.id¹, tantric.yazid@lecturer.unri.ac.id²,
anuar.rasyid@lecturer.unri.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi kebijakan Satpol PP dalam penertiban yang menimbulkan kontradiktif yang terjadi sehingga muncul penyediaan fasilitas pedagang kaki lima di kawasan jl. Tjut Nyak Dien. Meskipun komunikasi kebijakan Satpol PP sudah berjalan semestinya namun masih terjadi perbedaan penyampaian pesan kebijakan diantaranya, hal inilah yang menarik perhatian sehingga dilakukannya penelitian pada komunikasi kebijakan Sapol PP dalam penertiban dan penyediaan lapak pedagang kaki lima khususnya jl. Tjut Nyak Dien yang bertepatan langsung dengan kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan untuj dijadikan panduan yaitu teori yang di kemukakan oleh George C. Edward III. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mencaritahu pola komunikasi kebijakan Satpol PP Kota Pekanbaru, serta teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa teknis penyaluran komunikasi kebijakan yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban dan penyediaan lapak pedagang kaki lima (PKL) dilaksanakan melalui beberapa mekanisme komunikasi formal dan informal yang saling melengkapi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konsistensi komunikasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan petugas dalam menerjemahkan kebijakan secara utuh. Akibatnya, pedagang menerima penjelasan yang berbeda-beda tergantung petugas yang bertugas pada bidang yang berbeda. . Dalam beberapa kegiatan sosialisasi yang saya amati, petugas telah menyampaikan pesan kebijakan secara seragam sesuai instruksi pimpinan. Akan tetapi, terdapat perbedaan gaya penyampaian dan penekanan informasi di antara petugas, sehingga menimbulkan variasi persepsi di kalangan pedagang.

Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan, Satpol PP Kota Pekanbaru, Pedagang Kaki Lima.

ABSTRACT

This research aims to analyze the policy communication of Satpol PP in enforcement activities that have generated contradictions, which eventually led to the provision of facilities for street vendors in the Tjut Nyak Dien Street area. Although the policy communication of Satpol PP has generally been implemented as intended, inconsistencies in the delivery of policy messages still occur. These discrepancies became the main concern that encouraged the researcher to examine Satpol PP's policy communication related to the enforcement and arrangement of street vendor stalls, particularly on Tjut Nyak Dien Street, which is located adjacent to the Satpol PP Office of Pekanbaru City. The theoretical framework used in this study refers to the concepts proposed by George C. Edward III. The research method employed is qualitative, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation to explore the communication patterns of Satpol PP Pekanbaru. Data validity was ensured through triangulation techniques that combine multiple data sources and collection methods. The findings indicate that the communication mechanisms used by Satpol PP Pekanbaru in enforcing regulations and providing designated stalls for street vendors (PKL) involve both formal and informal communication channels that complement each other. The study also reveals that the consistency of communication is significantly influenced by the officers' ability to fully interpret the policy. As a result, vendors often receive different explanations depending on the officers' respective roles and responsibilities. In several socialization activities observed, officers delivered policy messages uniformly in accordance with leadership directives. However, variations in communication style and emphasis among officers still created differences in perception among the vendors.

Keywords: Policy Communication, Satpol PP Pekanbaru, Street Vendors.

A. PENDAHULUAN

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan isu klasik yang kerap muncul di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru. Keberadaan PKL sering menjadi dinamika tersendiri, di satu sisi mereka menjadi bagian penting dalam roda perekonomian rakyat karena menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, sementara di sisi lain mereka sering dianggap sebagai faktor penyumbang masalah ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Dinamika inilah yang membuat keberadaan PKL membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama dalam aspek regulasi, penataan, dan pengawasan. Pemerintah daerah memegang tanggung jawab utama dalam menjaga ketertiban tersebut yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari perangkat daerah. Lembaga ini memiliki mandat untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) serta kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban umum,

Perda ini mengatur berbagai aspek ketertiban masyarakat, termasuk larangan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan berdagang secara sembarangan. Regulasi ini menekankan pentingnya pengaturan lokasi usaha bagi PKL agar tetap dapat menjalankan aktivitas ekonominya tanpa mengganggu fungsi ruang publik. Implementasi kebijakan ini kemudian menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sebagai perangkat daerah yang berwenang menegakkan perda. Namun, proses implementasi sebuah kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penegakan aturan, tetapi juga erat kaitannya dengan komunikasi kebijakan. Komunikasi kebijakan merupakan bagian penting dalam memastikan pesan kebijakan pemerintah dapat dipahami, diterima, dan diikuti oleh kelompok sasaran. Dalam konteks penertiban PKL, keberhasilan Satpol PP tidak hanya diukur dari seberapa ketat mereka melakukan razia atau penertiban, melainkan juga seberapa efektif mereka mengkomunikasikan maksud, tujuan, serta alternatif solusi yang ditawarkan kepada para pedagang. Komunikasi kebijakan yang lemah akan menimbulkan resistensi, konflik horizontal, bahkan citra buruk bagi pemerintah daerah. Fenomena ini menjadi dilema klasik dalam tata Kelola kota di berbagai daerah, termasuk di Pekanbaru.

PKL bukanlah masalah baru dalam diskursus kebijakan publik di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2020), sektor informal ini tidak bisa semata-mata dihapuskan atau direpresi, melainkan harus dikelola dengan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif, dan adaptif. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan koersif tanpa menyediakan solusi konkret, karena hal tersebut justru dapat memicu konflik sosial dan memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat kelas bawah. Kota Pekanbaru saat ini menghadapi situasi yang cukup kompleks terkait penataan PKL, terutama di kawasan pusat kota yang padat aktivitas. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah kawasan Jalan Tjut Nyak Dien yang menarik perhatian publik karena berdekatan langsung dengan kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Keberadaan PKL di kawasan ini menciptakan situasi yang kontradiktif. Di saat Satpol PP secara aktif melakukan penertiban di berbagai lokasi, lembaga ini justru menyediakan dan memfasilitasi lapak bagi pedagang untuk berjualan di area yang berada dalam pengawasan langsung mereka.

Kawasan Jl. Tjut Nyak Dien menjadi titik krusial karena lokasinya yang strategis dan sensitif. Kawasan ini bukan hanya sekadar ruang ekonomi bagi PKL, tetapi juga wajah pemerintahan daerah karena berada di pusat aktivitas birokrasi. Kehadiran PKL yang tidak tertata sering dianggap merusak estetika kota dan mengganggu fungsi ruang publik. Namun di

sisi lain, bagi pedagang, kawasan ini merupakan sumber penghidupan yang sulit tergantikan. Ketegangan antara kebutuhan ketertiban umum dan kebutuhan ekonomi rakyat kecil inilah yang harus dijembatani melalui komunikasi kebijakan yang tepat. Dalam perspektif komunikasi, Satpol PP seharusnya tidak hanya dipandang sebagai aparat penegak perda, tetapi juga sebagai komunikator publik. Mereka harus mampu menyampaikan pesan kebijakan dengan cara yang persuasif, membangun kepercayaan, serta memfasilitasi ruang negosiasi antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan teori komunikasi kebijakan yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan pesan, saluran komunikasi yang digunakan, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kenyataannya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2023. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi yang komprehensif kepada PKL mengenai isi perda, hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi jika melanggar aturan. Banyak pedagang yang mengaku hanya mengetahui adanya penertiban secara mendadak tanpa mendapat informasi sebelumnya tentang lokasi alternatif yang disediakan pemerintah. Hal ini menimbulkan kesan bahwa komunikasi kebijakan masih bersifat top-down dan kurang mengakomodasi kebutuhan pedagang.

Festinger (1957) menjelaskan bahwa disonansi kognitif terjadi ketika individu menerima informasi yang bertentangan dengan pengetahuan atau harapan mereka sebelumnya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan psikologis dan bahkan dapat mengarah pada krisis kepercayaan terhadap institusi publik. Hal ini menjadi semakin problematis ketika ketidaktegasan dalam komunikasi kebijakan mulai menimbulkan persepsi bahwa aturan hanya berlaku secara selektif. Masyarakat menjadi bingung mengenai batasan-batasan yang berlaku, dan mulai mempertanyakan keadilan serta integritas kebijakan yang dijalankan. Sebagaimana diuraikan oleh Lasswell (1948), efektivitas komunikasi kebijakan sangat ditentukan oleh siapa yang berbicara, apa yang disampaikan, kepada siapa, dan dalam konteks apa komunikasi itu berlangsung.

Dari riset yang peneliti lakukan terhadap situasi Satpol PP di beberapa daerah lain di sekitar Provinsi Riau, tidak ditemukan adanya instansi Satpol PP yang secara aktif menyediakan atau memfasilitasi lokasi khusus bagi pedagang kaki lima (PKL). Fenomena ini justru secara unik terjadi di Kota Pekanbaru, di mana Satpol PP tidak hanya melaksanakan fungsi represif melalui penertiban PKL sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah (Perda) No. 13

Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum), tetapi secara simultan juga menjadi aktor fasilitatif dengan menyediakan lapak resmi bagi PKL tepat di halaman kantor mereka sendiri. Hal ini menciptakan suatu paradoks kebijakan yang berpotensi menimbulkan kebingungan di ranah publik. Permasalahan inti dalam konteks ini bukan semata pada tataran kebijakan normatif, melainkan pada komunikasi kebijakan yakni bagaimana pesan kebijakan dirancang, disampaikan, dan dipahami oleh publik. Dalam perspektif komunikasi organisasi, fenomena ini menunjukkan adanya disonansi komunikasi atau inkonsistensi pesan antara produk hukum (*policy message*) dan implementasi kebijakan di lapangan (*policy action*). Menurut Dunn (2018), komunikasi kebijakan yang tidak konsisten atau ambigu dapat melemahkan efektivitas kebijakan karena menciptakan multiinterpretasi, bahkan delegitimasi terhadap otoritas pembuat kebijakan. Dalam kerangka itu, tindakan Satpol PP Pekanbaru dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi paradoksal, yaitu ketika pesan-pesan yang dikomunikasikan secara formal melalui regulasi bertentangan dengan simbol dan tindakan aktual institusi.

Dalam situasi ini, Satpol PP memegang peran ganda sebagai penegak aturan sekaligus aktor komunikasi. Tanggung jawab mereka tidak hanya berada pada tataran pelaksanaan kebijakan, tetapi juga pada pembentukan persepsi dan legitimasi kebijakan itu sendiri di mata publik. Ketika komunikasi internal dan eksternal tidak berjalan dengan baik, maka narasi kebijakan akan dengan mudah digantikan oleh opini publik yang berkembang secara bebas dan tak terkendali. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana Satpol PP Kota Pekanbaru mengelola kebijakan tersebut melalui strategi komunikasi kebijakan yang mereka jalankan. Apakah mereka menyadari dampak dari kebijakan ganda ini terhadap persepsi masyarakat? Bagaimana mereka merespons kritik dan membangun kembali kepercayaan publik?. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pendekatan kualitatif dengan studi kasus akan digunakan dalam penelitian ini. Fokusnya adalah untuk memahami secara mendalam dinamika komunikasi kebijakan Satpol PP, khususnya dalam konteks paradoks antara penertiban PKL dan penyediaan lapak di kawasan yang sama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori komunikasi kebijakan dalam ranah pemerintahan daerah serta memperkaya wacana tentang pentingnya konsistensi komunikasi kebijakan di tengah tuntutan keterbukaan dan partisipasi publik yang semakin tinggi.

KERANGKA TEORI

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana interaksi manusia, tidak akan mungkin adanya interaksi tanpa adanya komunikasi, baik dengan cara yang sederhana maupun menggunakan media yang sangat canggih. Interaksi antara manusia yang menjadikan manusia membentuk masyarakat dengan kebudayaan mereka. Jadi sangat jelas komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yakni *communication*. Pada dasarnya, secara etimologis kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu *communis* yang bersumber pada kata *communis* yang berarti “sama”, *communico*, *communicatio*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (*to make common*). Istilah pertama *communis* paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 2014:46). Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung (melalui media) (Effendi, 2011:15).

2) Komunikasi Kebijakan

Menurut George C. Edwards III (1980), terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dari faktor faktor tersebut, komunikasi dianggap sebagai unsur yang paling menentukan. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan distorsi pesan, inkonsistensi, serta hilangnya kepercayaan terhadap lembaga negara. Komunikasi yang dimaksudkan oleh Edward III ini adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi publik dan terutama masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut.

Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Menurut Edward III ada tiga hal penting dalam dimensi komunikasi kebijakan ini yaitu (1) transmisi yaitu cara informasi disampaikan kepada

publik, (2) kejelasan informasi yang disampaikan, dan (3) konsisten pelaksanaan dari kebijakan yang diinformasikan itu. Abdul Wahab (2005) dalam bukunya mengatakan pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi, tujuan, serta implementasi kebijakan publik dari pembuat kebijakan kepada masyarakat luas atau kelompok sasaran. Komunikasi kebijakan mencakup proses bagaimana suatu kebijakan disosialisasikan, dijalankan, serta dikomunikasikan ulang ketika menimbulkan respon publik yang kompleks. Komunikasi yang tidak efektif dalam proses ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, resistensi publik, bahkan krisis kredibilitas Lembaga.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif, karena fokus utamanya adalah memahami makna dari Komunikasi Kebijakan Satpol PP Kota Pekanbaru. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan objek penelitian berdasarkan dari pengamatan peneliti saat melakukan observasi dan kemudian mendeskripsikan hasil temuan-temuan di lapangan dan mencoba menganalisis serta mengevaluasi berdasarkan data yang diperoleh.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai informan yang dipilih dipilih berdasarkan Purposive dengan kriteria sebagai berikut :

Informan Penelitian

No	Informan	Ciri/ Kriteria	Kategori
1	Amrullah	ASN/ Petugas aktif Satpol PP Menjabat minimal 2 tahun terakhir Mengatur teknis di lapangan	Penanggung jawab koordinator lapangan Satpol PP Kota Pekanbaru

2	Dedi Mulyono	Penganggung jawab pengamanan area kantor Satpol PP Kota Pekanbaru Mengatur teknis pengamanan di lingkungan kantor Satpol PP Kota Pekanbaru	Penanggung jawab bagian pengamanan
3	Agus Manalu	Anggota aktif Satpol PP Kota Pekanbaru Mengetahui proses teknis dan administatif terkait penyediaan lapak pedangan	Anggota yang terlibat dalam penyediaan lapak pedagang kaki lima
4	Deri Surya	Aktif berjualan di kawasan jl. Tjut Nyak Dien	Merupakan pedagang kaki lima di jl. Tjut Nyak Dien

Data dalam sumber ini terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif, ialah kata-kata (berupa tulisan ataupun lisan), dan tindakan. Sedangkan data sekunder adalah sumber data kedua, dilihat dari segi sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis, buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen pribadi (Moleong, 2015). Data dalam sumber ini terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif, ialah kata-kata (berupa tulisan ataupun lisan), dan tindakan. Sedangkan data sekunder adalah sumber data kedua, dilihat dari segi sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis, buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen pribadi Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Penelitian pada intinya yaitu bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai serta dapat memenuhi standard data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kondisi lapangan serta kebutuhan dalam pengumpulan data. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode obeservasi, wawancara,

dan dokumentasi.

Teknis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan interaktif model dari Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2014:251) Model ini dilaksanakan melalui 3 prosedur yaitu: penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk menjawab semua pertanyaan penelitian, maka peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III, Edward menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam dimensi komunikasi kebijakan yaitu saluran komunikasi, kejelasan informasi dan konsistensi.

1. Saluran Komunikasi Satpol PP dalam Penertiban dan Penyediaan Lapak Pedagang Kaki Lima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknis penyaluran komunikasi kebijakan yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban dan penyediaan lapak pedagang kaki lima (PKL) dilaksanakan melalui beberapa mekanisme komunikasi formal dan informal yang saling melengkapi. Pada tingkat operasional, Satpol PP menerapkan strategi face-to-face communication melalui sosialisasi lapangan sebagai pendekatan utama, dengan pertimbangan bahwa sebagian besar PKL berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah dan tidak seluruhnya memiliki akses atau literasi terhadap informasi digital. Dalam sosialisasi tersebut, petugas secara langsung menjelaskan dasar kebijakan, ketentuan area terlarang, serta opsi relokasi yang telah disiapkan. Observasi peneliti memperlihatkan bahwa bentuk komunikasi interpersonal ini dianggap lebih efektif dalam membangun pemahaman dan mengurangi resistensi karena adanya ruang dialog antara pedagang dan aparat.

2. Kejelasan Informasi Komunikasi Kebijakan Satpol PP dalam Penertiban dan Penyediaan Lapak Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan personel Satpol PP, pedagang kaki lima (PKL), serta studi dokumen terkait, saya menemukan bahwa upaya Satpol PP dalam menyampaikan kejelasan informasi mengenai

penertiban baru dilakukan melalui sejumlah teknik komunikasi yang dirancang untuk meminimalkan kesalahpahaman di tingkat pelaksana maupun penerima kebijakan. Salah satu temuan utama saya adalah bahwa Satpol PP berusaha menekankan kejelasan pesan melalui penyampaian informasi yang bersifat langsung dan berulang.

Kejelasan informasi merupakan faktor keberhasilan dalam mengkomunikasikan kebijakan, Amrullah mengungkapkan bahwa, “Pesan kebijakan yang kami sampaikan terkait penertiban pedagang kaki lima tersebut disampaikan dengan jelas dan merata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat.”

Konsistensi Komunikasi Kebijakan Satpol PP dalam Penertiban dan Penyediaan Lapak Pedagang Kaki Lima Konsistensi merupakan ujung tombak dalam komunikasi kebijakan jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan bahwa konsistensi komunikasi kebijakan Satpol PP Kota Pekanbaru merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan penertiban dan penataan lapak baru. Salah satu temuan utama saya adalah bahwa secara formal, Satpol PP telah memiliki prosedur komunikasi kebijakan yang cukup jelas, namun implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan searah. Dalam beberapa kegiatan sosialisasi yang saya amati, petugas telah menyampaikan pesan kebijakan secara seragam sesuai instruksi pimpinan. Akan tetapi, terdapat perbedaan gaya penyampaian dan penekanan informasi di antara petugas, sehingga menimbulkan variasi persepsi di kalangan pedagang

Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian yang telah diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumentasi sebagai alat pendukung guna menganalisis pola komunikasi kebijakan, hasil yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III sebagai landasan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai komunikasi kebijakan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban pedagang kaki lima yang menimbulkan kontradiktif yaitu penyediaan lapak pedagang kaki lima oleh instansi yang sama.

Bab ini membahas hasil penelitian yang telah diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumentasi sebagai alat pendukung guna menganalisis pola komunikasi kebijakan, hasil yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III sebagai landasan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai komunikasi kebijakan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban pedagang kaki lima yang menimbulkan kontradiktif yaitu penyediaan lapak pedagang kaki lima oleh instansi yang sama.

1. Saluran Komunikasi Kebijakan Satpol PP dalam Penertiban dan Penyediaan Lapak Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa teknis penyaluran komunikasi kebijakan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban dan penyediaan lapak pedagang kaki lima (PKL) merupakan proses komunikasi publik yang kompleks, melibatkan berbagai saluran, aktor, dan tingkatan birokrasi. Temuan ini sejalan dengan konsep komunikasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwads III yang menekankan bahwa efektivitas sebuah kebijakan sangat bergantung pada proses penyampaian pesan dari institusi pelaksana kepada pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Berbicara mengenai penertiban, hal ini sejalan dengan penelitian Rasyid, A (2014) yang berfokus pada aspek pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, namun kebaruan dalam penelitian yang saya lakukan terletak pada komunikasi kebijakan dalam konteks tindakan ganda Satpol PP Kota Pekanbaru tidak hanya melakukan penertiban pedagang kaki lima, namun turut serta menjadi penyedia lapak pedagang.

2. Kejelasan Informasi Satpol PP dalam Penertiban Yang Menimbulkan Penyediaan Lapak Pedagang

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan personel Satpol PP serta beberapa pedagang kaki lima, saya menemukan bahwa konsistensi komunikasi kebijakan Satpol PP Kota Pekanbaru merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan penertiban dan penataan lapak baru. Salah satu temuan utama saya adalah bahwa secara formal, Satpol PP telah memiliki prosedur komunikasi kebijakan yang cukup jelas, namun implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan searah. Dalam beberapa kegiatan sosialisasi yang saya amati, petugas telah menyampaikan pesan kebijakan secara seragam sesuai instruksi pimpinan. Akan tetapi, terdapat perbedaan gaya penyampaian dan penekanan informasi di antara petugas, sehingga menimbulkan variasi persepsi di kalangan pedagang. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdul Munif Muwu (2022) yaitu proses komunikasi kebijakan berlangsung antara pemerintah dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Namun yang membedakannya ada pada pendekatan dan objek kajiannya yang lebih kompleks dan kritis yang tidak hanya berhenti pada pengamatan terhadap proses

komunikasi kebijakan juga, tetapi dalam konteks penertiban dan penyediaan lapak pedagang kaki lima

3. Konsistensi Informasi Satpol PP dalam Penertiban

Hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan personel Satpol PP, serta pedagang kaki lima (PKL), menunjukkan bahwa kejelasan informasi merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan komunikasi kebijakan Satpol PP Kota Pekanbaru terkait penertiban dan penyediaan lapak. Temuan-temuan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif komunikasi kebijakan yang menekankan pentingnya clarity of message, communication channels, dan audience characteristics sebagai faktor penentu efektivitas komunikasi publik.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan personel Satpol PP Kota Pekanbaru mengenai komunikasi kebijakan Satpol PP dalam penertiban dan penyediaan lapak pedagang kaki lima jl. Tjut Nyak Dien yang dianalisa menggunakan teori komunikasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwad III, terdapat tiga temuan utama sesuai dimensi komunikasi kebijakan.

Paspek saluran komunikasi, Satpol PP telah menerapkan pola komunikasi berlapis, mulai dari komunikasi internal (instruksi struktural, rapat koordinasi) hingga komunikasi eksternal (penyampaian informasi kepada PKL melalui sosialisasi langsung dan kolaborasi dengan berbagai pihak). Namun, meskipun saluran komunikasi telah tersedia, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan koordinasi sesama petugas yang menjalankan tugas berbeda di setiap bidangnya, sehingga beberapa instruksi tidak tersampaikan secara merata dan menimbulkan kontradiktif dalam implementasi kebijakan kepada pedagang kaki lima khususnya di jl. Tjut Nyak Dien.

Kejelasan informasi, Satpol PP pada dasarnya sudah berupaya memberikan penjelasan mengenai lokasi relokasi, aturan penertiban, serta alasan kebijakan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua PKL menerima informasi yang sama lengkap dan konsisten. Beberapa PKL mengaku hanya mendapatkan informasi secara lisan dan mendadak, sehingga menimbulkan interpretasi berbeda dan potensi

Resistensi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan informasi masih memerlukan penguatan, terutama dalam penyediaan lapak pedagang kaki lima oleh instansi yang sama serta pesan yang tidak seragam dan terstruktur. Konsistensi komunikasi, Satpol PP telah menjalankan kebijakan berdasarkan SOP resmi, namun implementasinya di lapangan kadang tidak sepenuhnya konsisten. Petugas kerap menghadapi dinamika situasional, seperti perubahan instruksi mendadak atau penyesuaian kebijakan berdasarkan kondisi sosial-masyarakat. Inkoherensi pesan antara level pimpinan dan petugas lapangan membuat sebagian PKL menganggap kebijakan berubah-ubah, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Satpol PP Kota Pekanbaru memperkuat perencanaan komunikasi kebijakan melalui penyusunan strategi komunikasi yang lebih sistematis sebelum pelaksanaan penertiban. Proses ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan semua pihak terkait kelurahan, dinas perdagangan, dan perwakilan PKL untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan bersifat seragam dan tidak menimbulkan multiinterpretasi. Dengan perencanaan yang lebih matang, kebijakan dapat dijalankan secara lebih terarah dan mengurangi resistensi di lapangan.

Selain itu, penting bagi Satpol PP untuk meningkatkan kejelasan informasi publik melalui penyampaian informasi tertulis yang mudah diakses, seperti selebaran resmi, grafik lokasi penempatan lapak baru, atau pengumuman melalui kanal digital milik pemerintah daerah. Informasi tertulis mampu meminimalkan kesalahan persepsi dan memperkuat pemahaman PKL mengenai alasan, tahapan, serta manfaat penataan yang dilakukan. Upaya ini juga dapat menjadi dasar bagi PKL untuk mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anuar Rasyid, Y. K. (2014). Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Tugas Satpol Pp Dalam Penertiban Umum (Kasus Pedagang Kaki Lima Jl. Hr. Soebrantas Panam) Pekanbaru. Fisip Unri, 3(2), 58–66.
<http://www.tjybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachTy=pe&id=9987>

- Aritonang, A. I. (2015). Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal ASPIKOM*, 1(3), 261. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i3.24>
- Ayuningtyas, R. H. (2018). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Bungin, Burhan. 2000. Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi.
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Kencana, 2007).
- Creswell, John W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bintoro.
- Coombs, W. T. (2007). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding*. Sage Publications.
- Cutlip, M. Scott. et. al. 2006. *Effective Public Relations*, Ninth Edition. Penerjemah Tri Wibowo. B. S. . 2008. *Effective Public Relations*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Dunn, William N (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Routledge.
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 14
- Effendy, (2015) *Pengantar Ilmu Komunikasi & Dasar Dasar Ilmu Komunikasi : Pengantar Ilmu* (Bandung : Alfabeta CV. 2015)
- Jaya, P. (2021). STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU KOTA PEKANBARU DALAM MENJAGA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PEKANBARU PADA PEMILU TAHUN 2019. *JURNAL KOMUNIKASI UIN SUSKA*, 6.
- Komariah, K., Suwaryo, U., & Yuningsih, N. Y. (2020). JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Zonation , Quota and Rationalization : Implementation Paradox of Minimarket Arrangement Policy in Ciamis District. *JUPIIS Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*,

- 12(1), 57–67. [file:///Users/nuryantimustari/Desktop/kebijakan Zonasi/zonasi,kuota,rasionalisasi%0Aparadoks implementasi kebijakan.pdf](file:///Users/nuryantimustari/Desktop/kebijakan%20Zonasi/zonasi,kuota,rasionalisasi%0Aparadoks%20implementasi%20kebijakan.pdf).
- Moleong Lexy. J.2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Kanisius
- Moleong Lexy. J2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, G. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Jalan Merdeka Kota Bandung. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Muhajir, Noeng (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin. Mulyana, Deddy. 2002, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2020). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Edisi Revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 02(03), 793–800.
- Pratama, S. K. (2024). PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI ALUN- ALUN STABAT KABUPATEN LANGKAT PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGA. 2, 34–56.
- Puspitasari, D. E. (2010). Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota. *Mimbar Hukum*, 22, 588– 606.
- Sugiyono, 2004. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2013). Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta: Bandung
- Titi Riwati Gulo, Rosalia Mendrofa, E. (2024). Implementasi Kebijakan Publik serta Terhadap Kepentingan Publik Berdasarkan Teori Administrasi Negara Saat Ini. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 387–392.
- Umar, Zulkarnain (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standard Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layana Publik di Daerah. *Analisis dan Kebijakan Publik*, 3 (1): 1-13.

- Walean. M, Lengkong. F.D dan Londa. V. 2020.Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Jurnal Administrasi Publik. Volume 6 Nomor 96. Jurnal Administrasi Publik JAP No.3 Vol. IX (2023) Hal. 339-350 Publish. 17 Mei 2023 350
- Wibawa, S., & Sunaryo, H. (2017). Paradoks Penertiban PKL: Studi Kasus di Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21(1), 55–70.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPs.
- Wumu, A. M., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2022). Komunikasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. In Jurnal Administrasi Publik: Vol. VIII (8th ed., Issue 113).